

# IMPLEMENTASI SISTEM LAYANAN ADMINISTRASI BIROKRASI TERINTEGRASI (SADASBOR) BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN TASIKMALAYA

Muchamad Rifanggie Alfie

STIA YPPT Priatim Tasikmalaya

e-mail co Author: \*rifanggiealfie@gmail.com

## ABSTRAK

*Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi Sistem Layanan Administrasi Birokrasi Terintegrasi (SADASBOR) bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya. Metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui studi kepustakaan dan studi lapangan, termasuk observasi dan wawancara mendalam. Teknik analisis data meliputi reduksi data, display data, verifikasi data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan dimensi-dimensi implementasi SADASBOR di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya belum dilaksanakan secara keseluruhan. Dimensi sumberdaya, khususnya dalam hal kompetensi sumber daya manusia dan sarana prasarana seperti server dan ketersediaan sinyal telekomunikasi, masih belum optimal. Namun, beberapa dimensi seperti standar dan sasaran kebijakan, hubungan antar organisasi, karakteristik agen pelaksana, kondisi sosial politik dan ekonomi, serta disposisi telah dilaksanakan dengan baik. Kesimpulannya, implementasi SADASBOR di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya masih memerlukan perbaikan, terutama dalam meningkatkan sumberdaya dan infrastruktur yang mendukung.*

*Kata kunci: Implementasi Kebijakan dan Sistem Layanan Administrasi Birokrasi*

## PENDAHULUAN

Reformasi birokrasi memiliki makna yang sangat penting dalam mengadaptasi sistem pemerintahan untuk menghadapi tantangan yang muncul dalam era Revolusi Industri 4.0. Melalui penerapan teknologi digital, proses birokrasi dapat disederhanakan, transparansi serta akuntabilitas dalam pelayanan publik dapat ditingkatkan, dan inovasi dapat didorong secara lebih efektif. Reformasi birokrasi tidak hanya menjadi langkah penting untuk meningkatkan daya saing pemerintahan, tetapi juga sebagai upaya yang strategis dalam menjawab dinamika perkembangan teknologi yang terus berubah di era modern ini.

Selain menjadi upaya untuk meningkatkan efisiensi dan akuntabilitas dalam tata kelola pemerintahan, reformasi birokrasi juga merupakan langkah strategis untuk menghadapi tantangan dari era Revolusi Industri 4.0. Dengan memperbaiki sistem

dan proses administratif, reformasi ini tidak hanya memodernisasi pemerintahan, tetapi juga membangun fondasi untuk pengembangan sumber daya manusia yang kompeten dan adaptif. Hal ini menjadi kunci utama dalam menghadapi dinamika perubahan yang cepat dan kompleks yang dihadirkan oleh Revolusi Industri 4.0. Melalui reformasi birokrasi, pemerintah dapat membentuk SDM yang mampu berinovasi, beradaptasi, dan menjawab kebutuhan masyarakat dengan lebih responsif.

Reformasi birokrasi tidak hanya mencakup perbaikan prosedur administratif semata, melainkan juga melibatkan transformasi dalam sikap dan perilaku aparat pemerintah menuju profesionalisme, transparansi, dan kinerja tinggi. Langkah ini tidak hanya bersifat penting, melainkan juga strategis dalam membangun birokrasi yang efisien dan efektif, yang mampu memberikan pelayanan publik berkualitas kepada masyarakat. Penerapan Sistem Layanan Administrasi Birokrasi Terintegrasi (SADASBOR) oleh Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya mencerminkan inovasi dalam meningkatkan kinerja dan disiplin Pegawai Negeri Sipil (PNS).

Sebelumnya, dalam sistem penghargaan kepada pegawai, penilaian tidak didasarkan pada kinerja individu, yang menyebabkan timbulnya ketidakadilan serta kurangnya motivasi bagi pegawai yang berhasil mencapai prestasi. Situasi tersebut seringkali menciptakan lingkungan kerja yang tidak seimbang dan kurang mendorong bagi para pegawai yang berprestasi. Namun, dengan diperkenalkannya Sistem Layanan Administrasi Birokrasi Terintegrasi (SADASBOR), pemerintah telah berhasil mengubah paradigma ini. Melalui SADASBOR, pemerintah memberikan insentif kepada pegawai berdasarkan kinerjanya. Pendekatan ini tidak hanya memotivasi para pegawai untuk bekerja lebih keras, tetapi juga menciptakan lingkungan kerja yang lebih adil dan transparan.

Melalui SADASBOR, harapannya adalah terjadi transformasi dalam perilaku dan peningkatan kinerja pegawai, dengan mendasarkan sistem reward and punishment pada kriteria yang objektif. Sistem ini menawarkan insentif bagi pegawai yang menunjukkan kinerja yang baik, dengan memberikan tambahan penghasilan sejalan dengan pencapaian prestasinya. Di sisi lain, pegawai yang melanggar aturan akan dihadapkan pada sanksi berupa pemotongan tambahan penghasilan. Meskipun implementasi SADASBOR telah dimulai sejak tahun 2020, masih ada beberapa tantangan yang perlu diatasi, termasuk termasuk tingkat kesiapan pegawai dalam menguasai aplikasi serta perbaikan yang diperlukan dalam infrastruktur dan sumber daya. Pelanggaran seperti penggunaan fake GPS untuk absensi dan kurangnya koordinasi antar organisasi juga masih menjadi masalah yang perlu ditangani untuk memastikan efektivitas penuh dari SADASBOR.

Sistem Layanan Administrasi Birokrasi Terintegrasi (SADASBOR) menghadapi berbagai tantangan dalam implementasinya di Kabupaten Tasikmalaya. Salah satu masalah yang muncul adalah resistensi terhadap perubahan dari sebagian Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang belum sepenuhnya mengadopsi sistem baru ini. Selain itu, kurangnya infrastruktur teknologi informasi yang memadai dan akses internet yang terbatas di beberapa daerah juga menjadi hambatan dalam penggunaan SADASBOR

secara efektif. Selain itu, adanya kebutuhan akan pelatihan dan sosialisasi yang lebih intensif bagi pengguna potensial untuk memahami dan menggunakan sistem ini dengan baik.

Untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi SADASBOR, langkah-langkah yang dapat diambil termasuk investasi dalam infrastruktur teknologi informasi, penyediaan pelatihan yang komprehensif bagi PNS, serta kampanye sosialisasi yang lebih luas tentang manfaat dan cara penggunaan sistem ini. Selain itu, pembuatan panduan penggunaan yang jelas dan disertai dengan dukungan teknis yang baik juga penting untuk memastikan bahwa pengguna dapat mengatasi masalah teknis dengan cepat. Dengan langkah-langkah ini, diharapkan SADASBOR dapat menjadi alat yang efektif dalam meningkatkan kinerja dan disiplin PNS, serta mendukung terwujudnya pemerintahan yang transparan dan akuntabel di Kabupaten Tasikmalaya.

Dalam konteks mendukung reformasi birokrasi dan penerapan good governance, Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya telah menerapkan Sistem Layanan Administrasi Birokrasi Terintegrasi (SADASBOR), yang merupakan sebuah keseluruhan sistem yang menyatukan berbagai elemen termasuk perangkat pengolah data, perangkat penyimpanan data, dan perangkat komunikasi. SADASBOR dirancang untuk mendukung proses administrasi kepegawaian dengan menyediakan informasi yang diperlukan dalam bidang kedisiplinan Pegawai. Ini merupakan langkah strategis pemerintah daerah dalam menjalankan reformasi birokrasi di era digitalisasi 4.0 serta memperkuat sistem pemerintahan yang berbasis teknologi dan e-governance (Wilianto et al., 2022). Hasil penelitian selanjutnya menunjukkan bahwa evaluasi kualitas website Sistem Layanan Administrasi Birokrasi Terintegrasi (SADASBOR) melalui metode Webqual 4.0 menunjukkan bahwa aspek kegunaan, kualitas informasi, dan kualitas layanan interaksi secara keseluruhan berpengaruh terhadap kepuasan pengguna (Thyana, 2022).

Sadasbor merupakan salah satu bentuk kebijakan yang dibuat oleh Pemerintah. Kebijakan sendiri dapat berupa peraturan, aturan, atau tindakan yang disusun berdasarkan analisis situasi, kebutuhan, dan tujuan yang ingin dicapai. Tujuan dari kebijakan dapat bervariasi, termasuk untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, mengatur perilaku individu atau entitas tertentu, atau menciptakan lingkungan yang mendukung pertumbuhan ekonomi. Kebijakan juga dapat digunakan sebagai alat untuk mengatur dan mengarahkan perilaku atau aktivitas dalam suatu sistem atau lingkungan tertentu.

Kebijakan adalah upaya untuk memecahkan, mengurangi, atau mencegah suatu masalah dengan cara tertentu yaitu tindakan yang terarah (Hoogerwerf, 1992). Dari pernyataan tersebut dapat dijelaskan bahwa kebijakan merupakan suatu bentuk upaya yang dilakukan untuk mengatasi, mengurangi, atau bahkan mencegah suatu masalah yang ada dalam suatu konteks tertentu. Dengan mengambil tindakan yang terarah, kebijakan bertujuan untuk memberikan solusi konkret atas permasalahan yang dihadapi, baik itu dalam skala individu, kelompok, maupun masyarakat secara keseluruhan.

Melalui sebuah kebijakan, pihak yang berwenang mengarahkan langkah-langkah yang dibutuhkan untuk mencapai tujuan yang diinginkan, dengan mempertimbangkan berbagai faktor seperti kepentingan publik, aspek ekonomi, sosial, dan politik. Dalam implementasinya, kebijakan seringkali melibatkan regulasi, program-program tertentu, alokasi sumber daya, dan berbagai instrumen lainnya untuk mencapai hasil yang diharapkan. Istilah kebijakan (Wahab, 2008) menyatakan: “*Policy* itu adalah suatu tindakan berpola yang mengarah pada tujuan tertentu dan bukan sekedar keputusan untuk melakukan sesuatu”.

Edward III dan Sharkansky (Widodo, 2007) menyatakan: “*What government say and do, or not to do, it is the goals or purpose of government programs*”. Pernyataan tersebut menyiratkan bahwa tindakan dan kebijakan yang diambil oleh pemerintah, atau bahkan ketiadaan tindakan, selalu mengikuti tujuan atau tujuan dari program-program pemerintah. Artinya, segala keputusan yang diambil oleh pemerintah, baik itu berupa kebijakan yang diumumkan secara resmi maupun tindakan yang diambil dalam situasi tertentu, seharusnya selaras dengan misi dan tujuan yang telah ditetapkan oleh program-program pemerintah.

Istilah kebijakan dan kebijakan publik memiliki makna yang berbeda, Laswell, Kaplan, dan Easton (Subarsono, 2005) menyatakan: “Kebijakan publik sebagai pengalokasian nilai-nilai kepada masyarakat, karena setiap kebijakan mengandung seperangkat nilai di dalamnya”. Kebijakan publik dikatakan sebagai instrumen penting dalam pengaturan dan pengelolaan urusan masyarakat. Dalam esensinya, kebijakan publik tidak hanya berfungsi sebagai alat untuk mengatur tindakan dan alokasi sumber daya, tetapi juga sebagai cermin nilai-nilai yang dianut oleh suatu masyarakat. Ketika suatu kebijakan dibuat, terdapat proses pemilihan dan penekanan terhadap nilai-nilai tertentu yang dianggap penting dan relevan bagi kesejahteraan masyarakat. Nilai-nilai ini mungkin berupa keadilan, keberlanjutan lingkungan, kesetaraan, atau kebebasan.

Kebijakan dalam bentuk peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh pemerintah perlu diimplementasikan sehingga yang menjadi tujuan dapat tercapai. Istilah implementasi secara sederhana dapat dikatakan sebagai pelaksanaan. Implementasi kebijakan merupakan bagian penting dari serangkaian proses kebijakan publik. Menurut Winarno (Kusnandar, 2012) menyatakan: “Implementasi kebijakan mencakup usaha-usaha pada suatu waktu untuk mengubah keputusan-keputusan menjadi operasional”.

Implementasi kebijakan sebagai tahap terpenting dalam proses kebijakan publik di mana keputusan-keputusan yang telah dibuat diterjemahkan menjadi tindakan nyata. Proses ini melibatkan berbagai usaha yang dilakukan pada suatu waktu untuk mengubah kebijakan menjadi operasional dalam berbagai level administrasi atau organisasi terkait, termasuk penyusunan pedoman, alokasi sumber daya, pelatihan pegawai, perubahan struktur organisasi, serta komunikasi efektif kepada para pihak terkait. Melalui implementasi yang efektif, kebijakan dapat diterapkan dengan tepat dan dapat menghasilkan dampak yang diharapkan oleh pembuat kebijakan.

Analisis tentang implementasi Sistem Layanan Administrasi Birokrasi Terintegrasi (SADASBOR) bagi PNS di lingkungan pemerintah Kabupaten Tasikmalaya penting dilakukan karena berbagai alasan. Pertama-tama, SADASBOR memiliki potensi untuk mengubah secara signifikan cara PNS bekerja dan berinteraksi dengan sistem administrasi birokrasi. Dengan pemahaman yang mendalam tentang implementasi ini, pemerintah daerah dapat mengidentifikasi peluang dan tantangan yang mungkin timbul, serta merancang strategi yang efektif untuk memaksimalkan manfaatnya.

Selain itu, analisis tersebut juga dapat membantu dalam memperkirakan dampak SADASBOR terhadap efisiensi, produktivitas, dan kualitas layanan yang diberikan oleh PNS kepada masyarakat. Selanjutnya, dengan pemahaman yang lebih dalam tentang implementasi SADASBOR, pemerintah daerah dapat melakukan penyesuaian yang diperlukan dalam hal kebijakan, infrastruktur, serta pengembangan kapasitas SDM PNS untuk memastikan kesuksesan sistem ini. Terakhir, analisis mendalam juga penting untuk memahami implikasi etis, hukum, dan keamanan data yang terkait dengan implementasi SADASBOR guna menjaga integritas dan kepercayaan publik terhadap pemerintah dan sistem administrasinya.

## **METODE**

Penggunaan metode kualitatif bertujuan menganalisis implementasi Sistem Layanan Administrasi Birokrasi Terintegrasi (Sadasbor) bagi PNS di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya. Teknik pengumpulan data meliputi studi kepustakaan dan studi lapangan dengan menggunakan observasi dan wawancara. Informan penelitian terdiri dari pejabat dan pegawai di lingkungan tersebut. Proses analisis data dilakukan melalui langkah-langkah reduksi data, display data, serta penarikan kesimpulan dan verifikasi terhadap temuan yang diperoleh. Pendekatan kualitatif digunakan untuk memberikan pemahaman yang mendalam tentang bagaimana implementasi Sadasbor diterapkan dan dipahami oleh para PNS di Kabupaten Tasikmalaya, serta untuk menggali berbagai faktor yang mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan sistem tersebut.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

Sistem Layanan Administrasi Birokrasi Terintegrasi merupakan sebuah kebijakan publik yang bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas layanan administrasi di berbagai instansi pemerintah. Dengan pendekatan terintegrasi, berbagai proses administrasi yang sebelumnya terpisah-pisah dapat disatukan dan dijalankan secara lebih efisien, yang membantu mengurangi birokrasi yang berbelit-belit serta mempercepat penyelesaian berbagai urusan administratif bagi masyarakat. Melalui sebuah sistem memudahkan kerjasama dan koordinasi lebih baik antara berbagai instansi pemerintah, sehingga meminimalisir tumpang tindih dan duplikasi dalam pelayanan publik. Dengan demikian, Sistem Layanan Administrasi Birokrasi Terintegrasi tidak hanya menciptakan kemudahan akses bagi

masyarakat dalam mendapatkan layanan publik, tetapi juga membantu meningkatkan kinerja dan transparansi pemerintahan secara keseluruhan.

Sistem Layanan Administrasi Birokrasi Terintegrasi (Sadasbor) merupakan sebuah platform atau sistem yang dirancang khusus untuk mempermudah proses administrasi bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya. Melalui Sadasbor, PNS dapat mengakses berbagai layanan administrasi seperti pengajuan cuti, pengajuan perubahan data pribadi, peninjauan gaji, dan proses administrasi lainnya secara terintegrasi dalam satu platform digital. Dengan adanya Sadasbor, diharapkan efisiensi dalam pengelolaan administrasi PNS dapat meningkat, mengurangi birokrasi yang berbelit, dan mempercepat respon terhadap kebutuhan administrasi para PNS. Selain itu, Sadasbor juga memungkinkan adanya monitoring dan evaluasi yang lebih baik terhadap kinerja administrasi, sehingga memperkuat transparansi dan akuntabilitas di lingkungan birokrasi Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya.

Implementasi Sistem Layanan Administrasi Birokrasi Terintegrasi (Sadasbor) bagi PNS di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya memiliki makna yang signifikan dari konsep implementasi Meter dan Horn. Pertama-tama, dalam hal ukuran dan tujuan kebijakan, implementasi Sadasbor bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas administrasi birokrasi dengan memberikan layanan yang lebih terintegrasi kepada pegawai negeri sipil. Hal ini mengacu pada upaya untuk menyederhanakan proses administrasi serta meningkatkan aksesibilitas dan keterpaduan layanan. Kedua, dari segi sumber daya, implementasi memerlukan alokasi anggaran dan tenaga kerja yang memadai untuk pengembangan dan operasionalisasi sistem.

Implementasi Sadasbor tidak hanya melibatkan perubahan dalam kebijakan dan proses, tetapi juga memerlukan dukungan sumber daya yang cukup untuk memastikan keberlangsungan dan kesuksesannya dalam menghadirkan perubahan positif dalam administrasi birokrasi. Faktor ketiga yang menyoroti hubungan antar organisasi menjadi krusial dalam memastikan kerjasama antar unit pemerintahan terkait dalam mengimplementasikan Sadasbor secara efektif. Hal ini menegaskan pentingnya koordinasi dan kolaborasi antar instansi pemerintah dalam menjalankan kebijakan tersebut. Keempat, karakteristik agen pelaksana, seperti kemampuan teknis dan manajerial, akan berperan penting dalam menentukan keberhasilan implementasi Sadasbor, yang mencakup aspek kemampuan individu dan organisasi dalam mengelola sistem serta menangani tantangan yang muncul selama proses pelaksanaan.

Selanjutnya, kelima, kondisi ekonomi, sosial, dan politik setempat juga menjadi faktor penting yang memengaruhi implementasi Sadasbor. Dukungan politik dan stabilitas institusi di tingkat lokal dapat memfasilitasi atau menghambat pelaksanaan kebijakan tersebut. Terakhir, disposisi atau sikap implementor terhadap perubahan turut memengaruhi proses implementasi. Tingkat keterbukaan terhadap inovasi serta kemampuan untuk mengatasi resistensi menjadi faktor yang menentukan seberapa sukses Sadasbor diterapkan dalam praktiknya.

Faktor pendukung dalam mencapai keberhasilan implementasi Sadasbor sangatlah penting dalam konteks ini. Dukungan politik yang kuat dari pemerintah daerah dan stakeholder terkait memberikan landasan yang stabil untuk pelaksanaan program tersebut. Selain itu terpenuhinya sumber daya baik dari segi anggaran maupun SDM, memastikan bahwa proses implementasi dapat berjalan lancar tanpa terhambat oleh kendala-kendala yang berkaitan dengan keterbatasan tersebut. Komunikasi yang efektif antara berbagai unit organisasi terlibat dalam implementasi menjadi kunci untuk menjaga koordinasi dan kolaborasi yang diperlukan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

Selanjutnya tidak kalah penting, partisipasi aktif dari para pegawai negeri sipil dalam memahami dan menerima perubahan serta kemampuan adaptasi terhadap teknologi baru turut mendukung kesuksesan implementasi, karena hal ini memastikan bahwa seluruh anggota tim terlibat secara penuh dalam proses perubahan yang sedang berlangsung. Dengan adanya dukungan dari berbagai faktor tersebut, implementasi Sadasbor berpeluang lebih besar untuk mencapai keberhasilannya terutama bagi pelayanan administrasi secara terpadu yang dapat dilakukan secara efisien dan efektif.

Beberapa faktor penghambat dapat muncul dalam proses implementasi Sadasbor. Salah satunya adalah resistensi dari pegawai yang enggan mengubah cara kerja mereka. Selain itu, keterbatasan anggaran dan infrastruktur teknologi informasi yang tidak memadai juga dapat menjadi hambatan serius. Perubahan kebijakan dan regulasi yang tidak konsisten dari pemerintah pusat juga bisa menghambat proses implementasi. Selanjutnya, konflik kepentingan antar unit organisasi atau individu dalam organisasi juga dapat menghambat pencapaian keberhasilan implementasi Sadasbor. Melalui pemahaman dan mengatasi faktor-faktor tersebut, proses implementasi Sadasbor dapat berjalan lebih lancar dan efisien.

Dari hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pemerintah saat ini telah menerapkan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) sebagai salah satu strategi utama dalam meningkatkan efektivitas pelayanan publik, salah satunya dengan menerapkan SADASBOR. Pemanfaat TIK, pemerintah dapat menyediakan platform daring seperti portal pelayanan publik, aplikasi seluler, dan sistem informasi manajemen yang memungkinkan masyarakat untuk mengakses berbagai layanan dan informasi dengan cepat dan efisien. Penggunaan SADASBOR menjadi bagian penting dalam memperbaiki transparansi dan akuntabilitas dalam penyediaan layanan publik oleh pemerintah. Melalui TIK, pemerintah dapat memantau dan melaporkan kinerja lembaga-lembaga pemerintah secara real-time serta mengawasi penggunaan anggaran publik, yang memungkinkan masyarakat untuk melacak secara langsung bagaimana lembaga pemerintah menggunakan sumber daya dan mengukur efektivitasnya dalam memberikan layanan

## KESIMPULAN

Sistem Layanan Administrasi Birokrasi Terintegrasi (Sadasbor) merupakan salah satu kebijakan publik yang bertujuan meningkatkan efisiensi dan efektivitas layanan administrasi pemerintah. Dengan pendekatan terintegrasi, Sadasbor menyatukan proses administrasi untuk mengurangi birokrasi, mempercepat layanan bagi masyarakat, dan meningkatkan koordinasi antar instansi pemerintah. Implementasi Sadasbor mempertimbangkan faktor teori implementasi seperti tujuan kebijakan, sumber daya, hubungan antar organisasi, karakteristik agen pelaksana, kondisi setempat, dan disposisi implementor. Dukungan politik, sumber daya yang memadai, komunikasi efektif, partisipasi pegawai, serta pemahaman dan penanganan faktor penghambat menjadi kunci keberhasilan implementasi Sadasbor.

## DAFTAR PUSTAKA

- Hoogerwerf. (1992). *Ilmu Pemerintahan* (Tobing (ed.)). Erlangga.
- Kusnandar, I. (2012). *Analisis Kebijakan Publik*. Multazam.
- Subarsono, A. G. (2005). *Analisis Kebijakan Publik Konsep, Teori dan Aplikasi*. Pustaka Pelajar.
- Thyana, E. N. (2022). Analisis Kualitas Website Sistem Layanan Administrasi Birokrasi Terintegrasi (Sadasbor) Di Pemerintahan Kab.Tasikmalaya Dengan Menggunakan Metode Webqual 4.0. *Repositori Unsil*. <http://repositori.unsil.ac.id/7081/>
- Wahab, A. S. (2008). *Analisis Kebijaksanaan, Dari Formulasi Ke. Implementasi Kebijaksanaan Negara*. Bumi Aksara.
- Widodo, J. (2007). *Analisis Kebijakan Publik: Konsep dan Aplikasi Analisis Proses. Kebijakan Publik*. Bumi Aksara.
- Wilianto, Werdiningsih, R., & Diah, C. (2022). Peran Sistem Informasi Manajemen Aplikasi Sadasbor Dalam Menunjang Reformasi Birokrasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya. *Jarvic*, 1. <https://journal.lppspsemarang.org/index.php/Jarvic/article/download/44/64/121>